

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT KEPUTUSAN (SK) PEGAWAI
NON-PNS SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN PADA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Husnatya Adya Arifiana¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

INTISARI

Permasalahan dalam dunia perbankan seringkali berkaitan dengan keabsahan objek jaminan dalam perjanjian kredit, khususnya terkait penggunaan Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS sebagai jaminan. Jaminan SK secara hukum belum memiliki dasar yang kuat, ketidakpastian hukum dalam hal ini menimbulkan keraguan baik bagi pihak perbankan maupun debitur mengenai validitas dan kekuatan eksekusi jaminan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan hukum SK pegawai non-PNS sebagai objek jaminan kredit serta menelaah kepastian hukum dalam mekanisme eksekusinya jika terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK pegawai non-PNS tidak memenuhi unsur kebendaan dan tidak dapat dialihkan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan kredit secara langsung berdasarkan sistem hukum jaminan di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik perbankan, SK tersebut tetap digunakan sebagai dasar pemotongan gaji melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan instansi tempat pegawai bekerja. Dalam konteks ini, yang dijadikan objek jaminan adalah hak atas gaji (piutang), bukan SK itu sendiri. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal eksekusi saat terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan multitafsir dan risiko hukum bagi pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Jaminan Kredit, Kepastian Hukum, Pegawai Non-PNS, Surat Keputusan.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

**JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION LETTERS (SK) NON-CIVIL
SERVANT EMPLOYEES AS CREDIT GUARANTEES BANKING
AT THE SULTAN ABDURRAHMAN STATE ISLAMIC
COLLEGE IN THE RIAU ISLANDS**

Husnatya Adya Arifiana¹, Muhammad Zaki Mubarrak²

ABSTRACT

Issues in banking often relate to the validity of collateral in credit agreements, particularly regarding the use of non-civil servant employee decrees (SK) as collateral. SK collateral does not yet have a strong legal basis, and legal uncertainty in this regard raises doubts for both banks and debtors regarding the validity and enforceability of such collateral. This study aims to analyze the legal validity of SKs of non-civil servant employees as collateral for loans and to examine the legal certainty in the enforcement mechanism in the event of default. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, supported by literature review and qualitative analysis. The results of the study indicate that non-civil servant employee decrees do not meet the material requirements and cannot be transferred, so they cannot be used directly as collateral for credit under the Indonesian collateral law system. However, in banking practice, these decrees are still used as the basis for salary deductions through cooperation agreements (PKS) between banks and the institutions where employees work. In this context, the object of the collateral is the right to wages (receivables), not the SK itself. This creates a legal framework that does not yet fully provide legal certainty, especially regarding enforcement in the event of default. Therefore, more explicit legal regulations are needed to avoid ambiguity and legal risks for the parties involved.

Keywords: Credit Guarantee, Legal Certainty, Non-Civil Servant, Decree.

¹ Undergraduate Law Program Student at Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Undergraduate Law Program Lecturer at Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.